

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH



BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN BOMBANA 2022

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten, kami telah menyelesaikan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bombana.

Penyusunan SAKIP ini dimaksudkan adalah untuk memberikan gambaran hasil Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada Tahun Anggaran 2022, juga sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun yang akan datang.

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini masih banyak sekali kekurangannya oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya.

Rumbia, Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KAB. BOMBANA**



dr. H. SUNANDAR., MM.Kes
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP.19690716 200003 1 004

IKTISAR EKSEKUTIF

Implementasi Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan tatanan politik dan pemerintahan di Negara ini, dan sistem pemerintahan yang sentralistik ke sistem pemerintahan desentralistik. Manifestasi terselenggaranya Otonomi Daerah adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah, baik menyangkut administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berbagai hal yang menyangkut pelayanan publik (public service).

Sejalan dengan itu aparatur pemerintah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan Negara dan pembangunan dengan melalui penerapan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).

Keinginan masyarakat akan terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mencapai tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam melayani dan memenuhi kebutuhan serta kemajuan daerah Kabupaten Bombana melalui peningkatan kinerja.

Dalam upaya mencapai tujuan sasarannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun dalam program-program strategis, yang diharapkan dapat menuntun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

Program strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 20202 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasayarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi social dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konfli Sosial.

Namun dalam upaya mencapai kinerja yang baik, sering kali terjadi beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Di Tahun 2021, sumber daya manusia selaku aparaturnya BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana yang kompeten dalam pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas, sehingga lingkup atau cakupan wilayah Koordinasi sangat terbatas
2. Masih kurangnya rujukan atau aturan setingkat peraturan daerah maupun Peraturan Bupati yang lebih teknis terkait pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa maupun pemberdayaan perempuan terhadap pemahaman politik .

Berbagai catatan diatas, baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, akan menjadi perhatian bagi seluruh jajaran lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dalam upaya perbaikan pelaksanaan kerja di masa mendatang, sehingga kinerja yang dihasilkan dalam member manfaat kepada masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
IKTISAR EKSEKUTIF	iv- v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 UMUM	1
1.2 DASAR HUKUM	1
1.3 PROFIL LAYANAN SKPD	2
1.3.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.3.2. SUMBER DAYA MANUSIA	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
2.2 PERENCANAAN STRATEGIS	12
2.2.1. VISI DAN MISI	12
2.2.2. TUJUAN DAN SASARAN	13
2.2.3. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	14
2.3 PERJANJIAN KINERJA	14
2.3.1. KEBIJAKAN STRATEGIS	14
2.3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG DIGUNAKAN	15
BAB III. AKUTABILITAS KINERJA	16
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	16
3.1.1. CAPAIAN KINERJA BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	16
3.1.2. CAPAIAN KINERJA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN.....	17
3.1.3. CAPAIAN KINERJA BIDANG EKONOMI SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
3.1.4. CAPAIAN KINERJA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN/ REALISASI ANGGARAN	19
BAB IV. PENUTUP	21
4.1 KESIMPULAN	21
4.2 LANGKAH TINDAK LANJUT	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2022	
2. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 2023	
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD BAKESBANGPOL TAHUN 2022	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai Negeri Sipil lingkup BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana periode 31 Desember 2022	10
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama SKPD BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana Tahun 2022	12
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan Strategis BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana Tahun 2022	15
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 di Bidang Bina Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	17
Tabel 3.2	Realisasi capaian Kinerja Tahun 2022,2021, dan 2020 Di bidang Ideologi Wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	18
Tabel 3.3	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, Terhadap Target Kinerja RPJMD tahun 2022 Di Bidang Ideologi Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa	18
Tabel 3.4	Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja Di Bidang Ideologi pengembangan wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	19
Tabel 3.5	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2022 di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	19
Tabel 3.6	Realisasi capaian Kinerja Tahun 2022,2021, dan 2020 Di Bidang Penaganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	20
Tabel 3.7	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 ,2021 dan 2020 Terhadap Target Kinerja RPJMD tahun 2022 Di Bidang Penaganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	21
Tabel 3.8	Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	21
Tabel 3.9	Laporan Realisasi Anggaran badan Kesbangpol Tahun 2022	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa ini, khususnya penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Kemiskinan dalam berbagai macam bentuk dan implikasinya sehingga menjadi tantangan dan tanggung jawab bagi semua pelaku pembangunan khususnya Pemerintah Daerah untuk mengatasinya agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju.

Peran Pemerintah dalam proses penanggulangan konflik dan kantrantibmas adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan nyaman dalam proses pembangunan yang lebih kongkrit sebagai wujud perubahan peran Pemerintah sesuai tuntutan masyarakat. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membuat suatu terobosan baru guna pencapaian masyarakat aman nyaman dan tertib bebas dari serangan terror yang dewasa ini sangat meresahkan masyarakat bukan hanya masyarakat di Indonesia tapi juga menjadi permasalahan di seluruh dunia.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Bombana mengambil kebijakan strategis untuk mendorong dan memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bombana yang maju, mandiri dan sejahtera.

1.2. Dasar

SAKIP adalah merupakan pertanggung jawaban secara normatif bagi setiap OPD, oleh karena itu dalam penyusunan laporan ini mengacu dan berdasar pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi Dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kinerja antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bombana
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019.
8. Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana
9. Peraturan Bupati Bombana Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019.

1.3. Profil Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bombana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Bombana telah beberapa kali mengalami Perubahan, sejak berdirinya pada Tahun 2004, dimulai dengan Kantor Kesbangpol Dan Linmas yang kemudian berubah Menjadi Dinas Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2006 Kemudian Menjadi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas pada tahun 2008, dan pada Tahun 2017 Berubah nama Menjadi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bombana sampai sekarang.

Sejak terbentuknya, Bakesbang dan politik Kabupaten Bombana telah mengalami pergantian pimpinan, yaitu :

1. (Alm) Drs.H.Yassa
2. Drs. H DAndi Sakka Rahman
3. (Alm)Drs. Mashudin Basir M.Si
4. Hj. Sitti Saleha SE,M Si
5. Drs.Mustari Idris
6. Drs.Abdul Rahman MSi
7. Mahyuddin S.Sos,MSi
8. H.Nuhung SPd MSi
9. Abdul Rauf Abidin,SPd
- 10.Andi Bahtiar,S.sos
11. dr. H. Sunandar., MM.Kes

1.3.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat, membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kepala Bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun tugas dan fungsi dari masing – masing jabatan di atas adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Badan**, mempunyai tugas :

Memimpin Badan dalam menyelenggarakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. **Sekretaris**, mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan Penyusunan rencana dan Program Kerja kesekretariatan;

2. Sekretariat Di Pimpin Oleh Sekretaris Yang berada di bawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan Penyusunan Rencana Program;
- b. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- c. Penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang – undangan sesuai kebutuhan;
- d. Pengelolaan Administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor;
- e. Pengelolaan Pengurusan Urusan Rumah Tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Pemberian Bimbingan dan arahan kepada staf;
- h. Pelaksanaan Fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Badan Sesuai tugas dan fungsinya

2.1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan Anggaran berbasis kinerja, pengendalian Data, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengelolaan Laporan Aset daerah, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan., dalam Melaksanakan Tugasnya Kasubag Perencanaan dan Keuangan Mempunyai Fungsi

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan
- b. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan dan perencanaan Kebangpol
- c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan Kesbangpol
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan dan pelaksanaan perencanaan Kesbangpol
- e. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Kesbangpol
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

- h. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA
- i. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan surat menyurat, Urusan kepegawaian, Urusan rumah tangga dan perlengkapan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi public, perpustakaan dan organisasi, Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum Mempunyai Fungsi:

- a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja
- b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain
- c. Mengelola urusan perjalanan Dinas dan Keprotokoleran
- d. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain
- e. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai
- f. Mengendalikan arsip aktif
- g. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan Penyiapan Perumusan kebijakan, Koordinasi, Mediasi dan fasilitasi dalam Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, dalam Menjalankan Tugasnya Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan Fungsi:

- a. Pengumpulan bahan Keterangan dan Informasi di bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. Pemetaan Kondisi ideology, wawasan kebangsaan dan Karakter bangsa;
- c. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideology negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Pelaksanaan pemantapan dan Peningkatan kesadaran bela negara dan Cinta Tanah Air;
- e. Pembentukan dan Pengembangan karakter bangsa;

- f. Pelaksanaan penangan Dampak perkembangan Ideologi dan Perubahan Lingkungan Global dan Regional terhadap Kehidupan nasional;
- g. Penanaman dan pengamalan nilai – nilai Pancasila;
- h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila;
- i. Pendidikan Ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. Penanaman kecintaan terhadap Bendera, bahasa dan lambing Negara serta lagu Kebangsaan Indonesia sebagai sarana Pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan Negara;
- k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai – nilai perjuangan kebangsaan;
- l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan pancasila dan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. Melaksanakan dan Pembinaan Pembauran kebangsaan;
- n. Pelestarian Bhineka Tunggal Ika;
- o. Pelaksanaan Pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
- p. Pelaksanaan Pembinaan dan pemeliharaan intergrasi bangsa;
- q. Peningkatan Ketahanan dan Pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan;
- r. Pelaksanaan Tugas yang di berikan Pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala Bidang Politik dalam Negeri,

Kepala Bidang politik dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan Pengkajian kebijakan, mediasi komunikasi, dan Fasilitasi Di Bidang Fasilitasi Partai Politik dan pemilu serta fasilitasi Kelambagaan dan pendidikan Budaya Politik. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Politik dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan bahan Keterangan dan informasi di Bidang Politik dalam Negeri;
- b. Pemetaan situasi, Kondisi dan Unsur Unsur yang mempengaruhi Politik;
- c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat Di Bidang Politik
- e. fasilitasi partisipasi perempuan di Bidang politik;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan
- g. fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai Etika dan budaya politik;
- h. Penyusunan data dan informasi partai politik;
- i. Fasilitasi Peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik;

- j. Pelaksanaan Verifikasi bantuan keuangan Partai Politik;
- k. Pelaksanaan Komunikasi politik dengan Supra dan Infra struktur Politik;
- l. fasilitasi Penanganan Masalah di namika politik dalam Negeri;
- m. Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hokum
- n. Pemantauan pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden;
- o. Pemantauan Pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
Pemantauan Perkembang Politik dalam Negeri;
- q. Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan,

Kepala Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Bombana di bidang ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan organissi kemasyarakatan, Dalam melaksanakan tugasnya Kepala bidang ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan organisasi Kemasyarakatan Menyenggarakan Fungsi:

- a. Pengumpulan Bahan keterangan dan Informasi di bidang katahanan Ekonomi, social, Budaya dan Organisasi kemasyarakatan;
- b. Pemetaaan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Sumber daya alam, ketahanan Ekonomi, katahanan social, ketahanan seni, Budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi makro yang berdampak pada Stabilitas pemerintahan Daaerah;
- f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi Penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;

- h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi social kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perubahan social yang berdampak pada stabilitas Pemerintahan saewrah;
- j. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan kerawanan Sosial;
- k. Pelaksanaan Ketahanan nilai seni dan Budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- l. Fasilitasi dan koordinasi Pelestarian Bahasa Daerah sebagai bentuk manifestasikepribadian Bangsa dan keberagaman budaya Bangsa;
- m. Fasilitasi dan Koordinasi pelestarian pengembangan lagu bertema kebangsaan,cinta tanah air dan nasionalisme;
- n. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan;
- o. Pelaksanaan Pelayanan pendaftan,pemetaan,pembinaan dan pengwasan Organisasi kemasyarakatan,Organisasi kemasyarakatan Asing,serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan;
- p. Melaksanakan Pelaksanaan Tugas lain Yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bimbingan Tekhnis dan supervise,dan pelaksanaan pemantauan,Evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi di bidang ketahanan Ekonomi , social Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

6. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan nasional mempunyai tugas perumusan dan penetapan kebijakan sebagian tugas badan Kesatuan bangsa dan politik kabupaten bombana di Bidang penanganan Konflik dan kewaspadaan nasional

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala bidang Penanganan Konflik dan kewaspadaan nasional Menyenggarakan Fungsi:

- a. Pengumpulan bahan Keterangan dan Informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. Pemetaan Kondisi Stabilitas keamanan daerah,dampak teknologi dan informasi,Kondisi perbatasan antar daerah,serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
- c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam daerah;
- d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- e. Pelaksanaan Deteksi Dini mengeni informasi strategic dan kebijakan strategic;

- f. Pengolahan data dan Informasi Strategik dan kebijakan Strategik;
- g. Penyeleksian dan Pengintegrasian data dan Informasi Strategik dan kebijakan strategic;
- h. Pelaksanaan Analisis dan Penginterpretasian informasi strategic dan kebijakan strategic;
- i. Penyusunan Hasil analisis dan Evaluasi informasi strategic dan kebijakan strategic serta perkiraan keadaan;
- j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
- k. Pelaksanaan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- l. Pelaksanaan Koordinasi kewaspadaan perbatasan antar daerah;
- m. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
- n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga asing;
- o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang – undangan;
- p. Melaksanakan Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, untuk mencapai kinerja yang diharapkan, Badan Kesbangpol kabupaten bombana memiliki sumber daya manusia, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai Pegawai Honoror (Pegawai Harian Tidak Tetap).

Sampai dengan periode 31 Desember 2022, keadaan Pegawai lingkup Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, berjumlah 39 orang, yang terdiri dari 19 orang PNS dan 20 orang sebagai PHTT.

Berikut daftar pegawai negeri sipil beserta jabatannya pada lingkup Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Bombana :

Tabel I :

Daftar Pegawai Negeri Sipil lingkup Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana
Periode 31 Desember 2022

No.	Nama / Nip	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1.	dr. H. SUNANDAR ., MM. Kes NIP. 19690716 200003 1 004	Pembina Utama Muda , IV/c	Kepala Badan
2.	DWI ASMORO,S.Pd NIP. 19660328 198803 1 011	Pembina TK I, Gol IV/b	Sekretaris
3.	Drs.AMILU.,MM NIP. 19660101 199512 1 009	Pembina, TK I Gol IV/b	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
4.	ASDAR,SIP NIP. 19790607 200502 1 003	Pembina Gol IV/a	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
5.	ANDI BASO, SE NIP.19661231199503 1 019	Pembina TK I Gol, IV/b	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
6	Hj.SUARNI,SP.,MP	Pembina TK I,Gol III/d	Kepala Bidang Bina Ideologi danWawasan kebangsaan
7.	SABRIL, .S.Sos.,MM Nip.119631231 199302 1 013	Penata, III/c	Kasubag Umum
8.	AHMAD S.Sos NIP. 19750524 200701 1 014	Penata Tk.I, III/d	Analisis Kebijakan
9.	HERNIATI.ANTJI,SP NIP. 19800917 200502 2 004	Penata Tk.I, III/d	Kasubag.Perencanaan dan Keuangan
10	BUDU,S.IP NIP. 19691231 200701 1 460	Penata TK I, Gol III/d	Analisis Kebijakan
11	Dasmia S.Sos NIP. 19760822 201001 2 011	Penata, TK I III/d	Arsiparis
12	IRWAN JAMAL S.Sos Nip. 19731122 201412 1001	Penata III/c	Analisis Kebijakan
13	SITTI AMARWANGI S.Sos Nip. 19760814 201412 2 001	Penata III/c	Analisis Kebijakan
14.	ERNAWATI IDRIS,S.Kep Nip. 19851020 200903 2 011	Penata, III/c	Analisis Kebijakan
15	SUDIRMAN NIP.19750709 200701 1 016	Penata III/c	Analisis Kebijakan
16	RICHARD AS NIP.19831509 200901 1 003	Penata , III/c	Analisis Kebijakan
17	HJ.HASTUTI NIP.19820315 200901 2 001	Penata , III/c	Analisis Kebijakan
18	HJ.ULMIA NIP.19851231 201001 2 030	Pengatur TK I II/d	Staf
19	SUKARDIN NIP. 19820915 200901 1 007	Pengatur TK I II/d	Staf

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai, Sudah Memenuhi memenuhi kebutuhan secara rill. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Eselon IV/a yang sudah terisi secara keseluruhan, yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) .

Dengan memperhatikan bobot peran dan tanggung jawab yang diemban badan kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak didukung oleh jumlah pegawai yang memadai, maka Kepala Badan mengambil kebijakan internal dengan merekrut pegawai honorer/PHTT (Non PNS) sebanyak 20 orang dengan kualifikasi pendidikan sbb :

- Strata Satu (S-1) : 5 Orang, terdiri dari :
 - PHTT Kategori 2 : 3 orang
 - PHTT Non Kategori : 2 orang
 - Diploma II : 4 Orang
 - PHTT Kategori 2 : 3 orang
 - PHTT Non Kategori : 1 orang
- SLTA Umun dan Kejuruan : 13 Orang
 - PHTT Kategori 2 : 10 orang
 - PHTT Non Kategori : 7 orang

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur capaian kinerja OPD khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2022, maka Bakesbangpol Kabupaten Bombana menyusun Indikator Kinerja Utama OPD sebagai berikut :

Tabel 2.1 :
Indikator Kinerja Utama OPD Bakesbangpol
Kabupaten Bombana Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Jumlah Masyarakat dan Siswa Yang memahami Bela Negara	Orang	125
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam Peningkatan wawasan kebangsaan	%	90
3	Persentase Pemahaman siswa dan Siswi Sekolah menengah Pertama Dan Atas tentang pemahaman 4 pilar kebangsaan	%	98
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan terhadap konflik dini yang akan terjadi	%	98
5	Rasio Masyarakat, lembaga, parpol yang memahami pendidikan politik	%	98
6	Presentase Masyarakat yang memahami kerukunan antar Umat Beragama	%	100
9	Presentase Kebijakan Program Yang ada Di masyarakat Yang selalu di laksanakan	%	98

2.2. Perencanaan Strategis

Sebagai salah satu elemen perangkat daerah, Bakesbangpol Kabupaten Bombana perlu menyusun suatu perencanaan strategis dalam mencapai tujuan yang maksimal, sehingga harus dilandasi dengan niat dan kerja keras yang tulus serta suatu kematangan perencanaan yang dituangkan menjadi visi dan misi organisasi.

2.2.1. Visi dan Misi

Visi Badan Kesatuan Bangsa Politik Kab. Bombana adalah “**Mewujudkan Bombana Sejahtera(Munajah) Tahun 2017-2022**”

Berdasar visi tersebut di atas maka misi yang diemban Bakesbangpol Kabupaten Bombana adalah:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bombana yang demokratis melalui peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat.
2. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideology dan pembauran kebangsaan dalam tatanan social budaya manusia
3. Meningkatkan Kewaspadaan Dini masyarakat kabupaten Bombana terhadap Potensi Konflik.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam mengimplementasikan Misi Bakesbangpol Kab. Bombana, ditetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan strategis Bakesbangpol Kab. Bombana adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik.
2. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Pembauran kebangsaan.
3. Meningkatkan Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Potensi konflik.

Dari setiap tujuan harus ditetapkan sarannya agar dapat memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan serta agar dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang ingin dicapai. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi.
2. Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, Ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan
3. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Potensi Konflik

2.2.3. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud pada point 2.2.2, maka bakesbangpol Kabupaten Bombana menyusun program dan kegiatan yang berlandaskan atas potensi yang dimiliki oleh SKPD, penyusunan program dan kegiatan dimaksud dituang dalam perencanaan kerja Tahun 2022.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

2.3.1. Kebijakan Strategis

Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran serta penetapan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bombana sesuai dengan kewenangan yang ada. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Bombana Tahun 2022, meliputi :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan pemabauran kebangsaan
3. Memfasilitasi terwujudnya stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.
4. Peningkatan Kewaspadaan nasional di daerah.

2.3.2. Program dan Kegiatan serta Anggaran yang digunakan

Program dan kegiatan yang disusun untuk menunjang kebijakan strategis Bakesbangpol Kabupaten Bombana Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 :
Program dan Kegiatan Strategis
Bakesbangpol Kabupaten Bombana Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100.038.800,-
	a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang wawasan kebangsaan, Bela negara, karakter Kebangsaan, Pembauran kebnagsaandan Bhineka Tunggal Ika	60.038.800,-
	b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan bela negara Karakter bangsa pembauran kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika	40.000.000.-

2.	Prgram Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	923.738.482,-
	a. Pelasanaan Verifikasi Bantuan Partai Politik	53.478.250,-
	b. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik Peningkatan demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,perwakilan dan partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemnataan situasi Politik	48.693.000,-
	c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,Peningkatan demokrasi,Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dari partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta pemantauan situasi Daerah	180.000.000,-
	d. Pemberian bantuan Parpol	640.374.232,-
3.	Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	25.048.000,-
	a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi sengketa pengwasan ormas dan ormas Asing di daerah	5.048.000,-
	b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelapporan bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas asing di daerah	20.000.000,-
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	25.099.000,-
	a. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi,social dan Budaya dan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika fasilitasi kerukunan Umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	5.099.000,-
	b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan Ekonomi social dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan nerkotika fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	20.000.000,-
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	162.455.000,-
	a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama intelijen pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan Lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	35.955.000,-
	b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	127.500.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

3.1.1. Capaian Kinerja Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pada Tahun 2022, di Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa terdapat 1 Program dan 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan, dimana secara keseluruhan dari program/kegiatan tersebut pelaksanaannya rata-rata mencapai 100 %.

Pengembangan wawasan Kebangsaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 :
Target Dan Realisasi Tahun 2022
Di Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Tingkat capaian (%)
1	Jumlah Pelajar yang mengikuti orientasi wawasan Kebangsaan	100	100	100
2	Jumlah peserta Sosialisasi Empat Pilar kebangsaan	100	100	100

1. Jumlah Pelajar mengikuti Orientasi wawasan Kebangsaan

Dari table diatas, **Bahwa dalam Pelaksanaan Orientasi wawasan kebangsaan yang di terapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dengan sasaran Pelajar SMA/ sederajat telah dapat di laksanakan sesuai dengan rencana yaitu sebanyak 250 siswa di mana pada pelaksanaannya telah menghasilkan kader wawasan kebangsaan di kalangan pelajar sebanyak 100 orang.**

Capaian indicator jumlah pelajar yang mengikuti orientasi wawasan kebangsaan dari tahun ke tahun sejak 2020 – 2022 berturut-turut adalah 98%,98%,40%.

Kendala yang dihadapi dalam orientasi wawasan kebangsaan adalah masih kurangnya dana dan kesadaran masyarakat khususnya pelajar SMU, karena orientasi wawasan kebangsaan bukan hanya di peruntukkan untuk pelajar SMU sederajat tapi SMP sederajat perlu pengetahuan tentang wawasan Kebangsaan.

2. Jumlah Peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Salah satu elemen penting dalam terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang Empat Pilar Kebangsaan adalah meningkatnya partisipasi dan Pemahaman Masyarakat Dalam Meningkatkan rasa Cinta Tanah Air, Hormat Manghormati, Saling Menghargai, Tolong Menolong . Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan Sangat Penting di terapkan dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Era Globalisasi yang Semakin Hari nilai –nilai kebangsaan semakin Memudar Dari Semua Fenomena Yang ada dimasyarakat saat ini bakesbang pol kabupaten bombana mengadakan Sosialisasi dan Koordinasi Empat Pilar Kebangsaan dengan sasaran tokoh agama, adat, tokoh masyarakat pemuda dan organisasi wanita yang telah dapat di laksanakan sesuai rencana sebanyak 200 orang. dapat di katakan menunjukkan reaksi positif karena indicator terpenuhi 50 % yang bermakna baik.

Realisasi dari tahun 2020 – 2022 pada bidang Pengembangan wawasan Kebangsaann dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 :
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022
Di Bidang Bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter Bangsa

No	Indicator	Realisasi		
		2022	2021	2020
1	Jumlah pelajar yang mengikuti orientasi wawasan kebangsaan	100	100	120
2	Jumlah peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan	100	125	125

Tabel 3.3:

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, Terhadap Target Kinerja RPJMD 2022
Di Bidang Bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa

No	Indicator Kinerja	TARGET RPJMD	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
1	Jumlah pelajar yang mengikuti orientasi wawasan kebangsaan	250 Orang	100 Orang	40
2	Jumlah Peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan	150 Orang	100 Orang	50

Tabel 3.4:
Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja
Di Bidang Bina Ideologi,wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

No	Indicator Kinerja	Program	Kegiatan	(Anggaran)
1	Jumlah pelajar yang mengikuti orientasi wawasan kebangsaan	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Bangsa	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Bangsa	60.038.800,-
2	Jumlah peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter bangsa	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Bangsa	40.000.000,-

3.1.2. Capaian Kinerja Bidang Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Di bidang Penanganan konflik dan Kewaspadaan Nasional pada tahun 2022 terdapat 1 program dan 1 kegiatan serta 2 Sub Kegiatan, diantaranya adalah Penanganan Konflik Sosial Masyarakat,Pembinaan Forum Kewaspadaan Masyarakat, Kajian Penanganan Konflik di Masyarakat,Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Situasi Daerah, Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Capaian indicator kinerja bidang penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5 :
Target Dan Realisasi Tahun 2022
Di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)
1	Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	1	1	100
2	Presentase Kebijakan yang di hasilkan oleh anggota Tim Kewaspadaan	4	4	100
3	Jumlah Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	1	1	100
4	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	3	3	100
5	Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	4	1	25

1. Jumlah Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat terlaksana Melalui kegiatan rapat koordinasi, konsultasi dan silaturahmi yang di fasilitasi oleh badan Kesatuan bangsa dan politik kabupaten Bombana.

Realisasi kegiatan terakumulasi baik kegiatan terlaksana 100%, pelaksanaan Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat ini bertujuan saling Memberi Informasi, dan Deteksi Dini Maupaun Kewaspadaan Dini Terhadap Kemungkinan Kemungkinan Timbulnya Konflik Sosial di masyarakat, sedangkan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Hanya di laksanakan Satu Kali Kegiatan dari target 4 kali Kegiatan, Hal ini di sebabkan Karena adanya Rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait pemberian Honor tim Penunjang Yang tidak sesuai dengan Permenkeu Tentang Pemberian Honorarium.

Dari Pertemuan di atas Di Hasilkan kesimpulan Bahwa Deteksi Dini Dan Kewaspadaan Dini Masyarakat sangatlah Penting di Terapkan Di Semua kecamatan dan Wilayah Di seluruh Kabupaten Bombana Guna Mengantisipasi Konflik Yang Mungkin akan terjadi di Masyarakat.

2. Presentase Kebijakan Yang di hasilkan Oleh Anggota Tim Kewaspadaan Nasional Di Daerah

Dengan Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Keputusan Bupati Bombana Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah danb Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Daerah kabupaten Bombana Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Kegiatan ini di laksanakan sebagai upaya mempermudah pelaksanaan koordinasi, penghimpun data, dan fakta yang terjadi di wilayah kabupaten bombana yang berkaitan dengan isu isu strategis menyangkut keamanan dan ketertiban, di mana kegiatan Deteksi Dini sampai saat ini masih berkesinambungan dengan mengadakan rapat rapat koordinasi dalam mengantisipasi segala konflik yang akan terjadi untuk keamanan dan ketertiban di kabupaten bombana sehingga pelaksanaan siskamwakarsa lebih meningkat.

3. Jumlah Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Dalam pelaksanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat terlaksana 100%. Keanggotaan forum ini terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, organisasi dan seluruh stakeholders. Keanggotaan forum ini di atur oleh peraturan pemerintah dan diwajibkan kepengurusan di pusat sampai di daerah dalam hal ini sampai di desa/kelurahan.

Realisasi capaian dari tahun 2020 – 2022 pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6:
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, 2021, dan 2020
Di penanganan konflik

		2020	2021	2020
1	Jumlah kegiatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat di kab. Bombana	1	1	1
2	Presentase Kebijakan Yang di haslkan oleh anggota Tim Kewaspadaan Nasional	100%	100%	100%
3	Jumlah kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	1	1	1
4	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi	3	3	3
5	Pelaksanaan Forum koordinasi Pimpinan Daerah	1	4	4

Tabel 3.7:
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, Terhadap Target Kinerja RPJMD 2022
Di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

No	Indicator Kinerja	TARGET RPJMD	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
1	Jumlah kegiatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat Kab. Bombana	2 Laporan	3 Laporan	100
2	Presentase Kebijakan Yang di haslkan oleh anggota Tim Kewaspadaan Dini Daerah	4 kegiatan	4 Kegiatan	100
3	Jumlah kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
4	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi situasi Daerah	3 Kegiatan	3 kgiatan	100
5	Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	4 kegiatan	1 Kegiatan	25

Tabel 3.8:
Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja
Di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

No	Indicator Kinerja	Program	Kegiatan	(Anggaran)
1	Jumlah kegiatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat di kab.Bombana	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rapat Koordinasi Tim Penanganan Konflik Sosial Masyarakat	34.955.000,-
2	Presentase Kebijakan Yang di haslkan oleh anggota Tim Kewaspadaan Nasional Di daerah	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	<i>Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Nasioanal Di daerah</i>	34.955.000,-
3	Jmklah kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Kinerja FKDM	34.955.000-
4	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Situasi Daerah	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Monitoring, Evaluasi Pemantauan Situasi Daerah	34.955.000,-
5	Jumlah Kegiatan Forum koordinasi Pimpinan Daerah	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	127.500.000,-

3.1.3. Capaian Kinerja Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan

Di bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada tahun 2022 terdapat 2 program dan 2 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan, diantaranya adalah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba,,Koordinasi Kerukunan Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, dan Sosialisasi Peraturan pemerintah Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan, Koordinasi Ketahanan Ekonomi, Monitoring Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan.

Capaian indicator kinerja bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya Dan Organisasi kemasyarakatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut

Tabel 3.9 :
Target Dan Realisasi Tahun 2022
Di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)
1	Presentase Kebijakan yang di hasilkan oleh anggota Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	1	1	100%
2	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Ormas,OKP,dan LSM	22	22	100%

1. Presentase Kebijakan Yang di hasilkan Oleh anggota FKUB

Dengan Mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah/Wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan Antar Umat beragama,Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pemberian Rumah Ibadah. Kegiatan ini di laksanakan sebagai upaya mempermudah pelaksanaan koordinasi,penghimpun data,dan fakta yang terjadi di wilayah kabupaten bombana yang berkaitan dengan isu isu strategis menyangkut keamanan dan ketertiban,di mana kegiatan FKUB sampai saat ini masih berkesinambungan dengan mengadakan rapat rapat koordinasi dalam mengantisipasi segala konflik yang akan terjadi untuk keamanan dan ketertiban di kabupaten bombana sehingga pelaksanaan siskamwakarsa lebih meningkat

2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Organisasi Kemasyarakatan terlaksana 100%. Sosialisasi ini di hadiri oleh tokoh masyarakat, pemuda, organisasi dan seluruh stakeholders. Keanggotaan forum ini di atur oleh peraturan pemerintah dan diwajibkan kepengurusan di pusat sampai di daerah dalam hal ini sampai di desa/kelurahan. Realisasi capaian dari tahun 2020 – 2022 pada Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10:
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, 2021, dan 2020
Di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

		2022	2021	2020
1.	Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	3	3	100%
2.	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas, OKP dan LSM	22	22	100

Tabel 3.11:
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, Terhadap Target Kinerja RPJMD 2022
Di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

No	Indicator Kinerja	TARGET RPJMD	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
1	Jumlah kegiatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat Kab. Bombana	150 Orang	150 Orang	100
2	Presentase Kebijakan Yang di haslkan oleh anggota FKUB	5 Dokumen	4 Dokumen	90
3	Jmlah kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Organisasi Kemasyarakatan	150 Orang	150 Orang	100

Tabel 3.12:
Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja
Di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

No	Indicator Kinerja	Program	Kegiatan	(Anggaran)
1	Jumlah kegiatan Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba	25.099.000,-
2	Presentase Kebijakan Yang di haslkan oleh anggota FKUB	Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, social dan Budaya	Rapat koordimasi kerukunan antar umat beragama	25.099.000,-
3	Jumlah kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan	25.099.000,-

3.1.4. Capaian Kinerja Bidang Politik Dalam Negeri

Di bidang Politik dalam Negeri pada tahun 2022 terdapat 1 program dan 1 kegiatan, dan 3 Sub kegiatan diantaranya adalah Verifikasi Bantuan Partai Politik, Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan situasi Politik, Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.

Capaian indicator kinerja bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13:
Target Dan Realisasi Tahun 2022
Di Bidang Politik Dalam Negeri

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Tingkat capaian (%)
1	Jumlah Laporan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	3	3	100
2	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3	3	100
3	Jumlah Kegiatan Verifikasi Partai Politik di Kab. Bombana	10	10	100

1. Jumlah Laporan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala daerah serta Pemantauan situasi Politik di Daerah.

Dalam Pelaksanaan Kegiatan koordinasi di bidang Pendidikan politik Etika Budaya politik Bidang Politik Dalam Negeri mengadakan koordinasi dengan Stakeholder di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk kemudian menyamakan persepsi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di lakukan Sehubungan dengan Sinkronisasi Program / Kegiatan.

Realisasi kegiatan terakumulasi baik dan kegiatan terlaksana 100%, pelaksanaan Kegiatan Koordinasi ini Bertujuan Untuk Menyamakan Persepsi, Percepatan Pelaksanaan Kegiatan. Bagaimana Percepatan Pelaksanaan Kegiatan agar terlaksana dengan baik dan benar.

Dari Kegiatan di atas Di Hasilkan kesimpulan Bahwa Kegiatan Pendidikan Politik sangatlah Penting di Terapkan Di Semua kecamatan dan Wilayah Di seluruh Kabupaten Bombana Guna Mengantisipasi penurunan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu .

2. Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Dengan Mengacu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah dalam Upaya Menyukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 .Kegiatan ini di laksanakan sebagai upaya mempermudah pelaksanaan koordinasi, penghimpun data, dan fakta yang terjadi di wilayah kabupaten bombana yang berkaitan dengan pemiliha Umum. Kegiatan ini masih berkesinambungan dengan mengadakan Pemantauan Pemantauan di wilayah Kecamatan desa dan kelurahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum.

3. Verifikasi Partai Politik

Dalam pelaksanaannya kegiatan Verifikasi Partai Politik di kabupaten bombana terlaksana 100%. Kegiatan ini di bentuk tim verifikasi yang mempunyai tugas memverifikasi data yang di ajukan oleh partai politik yang mempunyai keterwakilan di DPR kab. Bombana.

Realisasi capaian dari tahun 2020 – 2022 pada Bidang Politik dalam Negeril dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14:
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022,2021,dan 2020
Di Bidang Politik Dalam Negeri

		2022	2021	2020
1	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik di masyarakat	0	150	150
2	Jumlah Peserta Pelaporan keuangan kepada Parpol	0	0	30
3	Presentase Pegawai Negeri yang melakukan Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	3	3	3
4	Jumlah Dokumen Verifikasi Partai Politik	3	3	3

Tabel 3.15:
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022, Terhadap Target Kinerja RPJMD 2022
Di Bidang Politik dalam Negeri

No	Indicator Kinerja	TARGET RPJMD	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
1	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik di masyarakat	200 Orang	0 Orang	0
2	Jumlah Peserta Pelatihan Keuangan Kepada partai Politik	30 Orang	30 Orang	100
3	Jumlah Dokumen Pemantauan Pemilihan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	3 Dokumen	3 Dokumen	100
4	Jumlah Dokumen Verifikasi Bantuan Partai Politik	10 Dokumen	10 Dokumen	100

Tabel 3.16:
Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja
Di Bidang Politik dalam Negeri

No	Indicator Kinerja	Program	Kegiatan	(Anggaran)
1	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan Politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan Etika Budaya Politik	Sosialisasi pendidikan Politik	0,-
2	Jumlah Peserta Pelatihan Keuangan Kepada Partai Politik	Peningkatan Peran partai Poltik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Pelatihan Pelaporan Keuangan Kepada Partai Politik	0,-
3	Jumlah Dokumen Pemantauan Pemilihan Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Politik dalam negeri	180.180.000,-
4	Jumlah Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Etika Budaya Politik	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai politik	692.548.482,-

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Secara umum realisasi anggaran tahun 2022 untuk program dan kegiatan strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17:
Laporan Realisasi Anggaran Bakesbangpol Kabupaten Bombana
Tahun 2022

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	DPPA 2022	Realisasi Anggaran	(%)
A	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100.038.800,-	99.995.800,-	99,96%
	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100.038.800,-	99.995.800,-	99,96 %
1	Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan Pelaporan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40.000.000,-	40.000.000,-	100%
2	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60.038.000,-	59.995.800,-	99,93%
B	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	922.738.482,-	921.330.432,-	99,85%
	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	922.738.482,-	921.330.432,-	99,85%

1	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	742.548.482,-	741.170.432,-	99,81%
2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	180.180.000,-	180.160.000,-	99,99%

C	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	25.048.000,-	24.239.800,-	96,77%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	5.044.000,-	4.239.800,-	84,06%
2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000,-	20.000.000,-	100%
D	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, social dan Budaya	25.099.000	24.546.400,-	97,8%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan narkoba, Fasilitas Kerukunan	5.099.000,-	4.546.400,-	89,16%

	Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20.000.000,-	20.000.000,-	100%
E	Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	162.455.000,-	162.455.000,-	100%
	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sosial			
1	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik Sosial di daerah	34.955.000,-	34.955.000,-	100 %
2	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/ Kota	127.500.000,-	127.500.000,-	100 %

Dari table diatas diperoleh bahwa capaian penyerapan anggaran tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Bombana mencapai 98.69%, yang berarti bahwa tingkat keberhasilan pencapaian Kesbang politik dan sangat baik.

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Sepanjang tahun 2022 ini, beberapa keberhasilan maupun ketidakberhasilan telah dicapai oleh BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan bela Negara, Meningkatnya kesadaran masyarakat pedesaan tentang ketentraman, keamanan dan kenyamanan lingkungan, Deteksi dini terhadap kemungkinan konflik yang akan terjadi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya teroris yang setiap saat mengancam situasi keamanan dan stabilitas keamanan, bangsa. Peningkatan Pemahaman tokoh agama tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, peningkatan pemahaman kepada tokoh agama, pemuda, perempuan, parpol, lsm okp terhadap kewaspadaan dini masyarakat. Namun demikian, beberapa ketidakberhasilan memang masih mewarnai kinerja dari BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang Tahun 2022 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan, peran serta masyarakat, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat, OKP, Parpol se Kabupaten Bombana dan keseluruhan personil BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2022 ini.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam usaha meningkatkan pemahaman masyarakat tentang deteksi dini, peningkatan wawasan kebangsaan, cegah dini terhadap konflik, adanya serangan teroris, dan orang asing, antara lain sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya sumber daya manusia di BAKESBANGPOL, baik jumlah personil maupun kemampuan dalam spesifikasi keahlian yang memadai yang diperlukan dalam tugas dan fungsi yang diemban oleh BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai pada kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seperti laptop, lemari arsip, dan kendaraan dinas
- c. Belum terkoordinasinya dengan baik, tugas dan fungsi BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana dengan stakeholder maupun OPD lainnya yang terkait langsung dengan program Peningkatan Pemahaman terhadap cegah dini konflik.
- d. Kualitas sumber daya Masyarakat yang masih rendah.

1.2 Langkah tindak lanjut.

Dalam upaya meningkatkan kinerja BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana ke depan, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dan pengajuan penambahan personil di BAKESBANGPOL Kabupaten Bombana
- b. Melakukan koordinasi secara intensif dengan stakeholder dan SKPD lainnya terkait program Peningkatan wawasan kebangsaan,cegah dini terhadap konflik dan kewaspadaan dini terhadap serangan teroris,dan Kerukunan antar umat beragama.
- c. Melakukan upaya fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya aparatur masyarakat secara berkala dan berkelanjutan.

Demikian penyusunan SAKIP Tahun 2022 ini kami buat dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk dapat selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Rumbia, Januari 2023

**Kepala BAKESBANGPOL
Kab. Bombana,**



Dr. H. SUNANDAR., MM.Kes
Pembina UtamMuda, IV/c
NIP. 19690716 200003 1 004